

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian implementasi kebijakan Kelola barang yang tidak digunakan dan memiliki nilai jual sebagai sumber daya listrik di PLTSa Benowo Surabaya dengan ilmu Merilee S. Grindle, mengacu pada rumusan masalah penelitian, dapat dinilai bahwa:

1. Implementasi ke bijakan pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui PLTSa Benowo di Kota Surabaya pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya dukungan regulasi, kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta sebagai operator, serta ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke jaringan PLN. Secara operasional, PLTSa Benowo mampu membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar. Beberapa warga masih merasakan dampak lingkungan seperti bau dan gangguan kenyamanan sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga pada penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini meliputi adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta sebagai pengelola PLTSa, serta ketersediaan infrastruktur pengolahan sampah yang memadai. Selain itu, sistem koordinasi dan pengawasan antara pemerintah daerah dan pihak operator juga telah berjalan secara formal sehingga membantu menjaga stabilitas operasional kebijakan tersebut.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, terutama terkait dengan dampak lingkungan yang dirasakan masyarakat sekitar serta keterbatasan komunikasi dan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan transparansi, komunikasi, dan responsivitas pemerintah agar dukungan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Waste to Energy* dapat semakin kuat.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu terus meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi *Waste to Energy* melalui optimalisasi pengelolaan operasional PLTSa Benowo. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan terhadap proses pengolahan sampah, memastikan bahwa seluruh tahapan operasional

berjalan sesuai dengan standar teknis dan lingkungan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja operasional PLTSa, baik dari segi efektivitas pengurangan volume sampah maupun dari segi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar mampu memberikan manfaat optimal bagi pengelolaan sampah perkotaan. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengendalian dampak lingkungan, seperti pengelolaan emisi dan pengendalian bau, sehingga gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar dapat diminimalisasi. Dengan demikian, keberadaan PLTSa Benowo tidak hanya berfungsi sebagai solusi dalam mengurangi volume sampah perkotaan, tetapi juga mampu menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan serta dapat diterima secara lebih luas oleh masyarakat.

2. Pemerintah Kota Surabaya perlu meningkatkan transparansi informasi serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat sekitar terkait pengelolaan PLTSa Benowo. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat memahami secara lebih jelas mengenai proses pengolahan sampah menjadi energi listrik, manfaat yang dihasilkan, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengendalikan dampak lingkungan dari operasional PLTSa. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti penyelenggaraan sosialisasi secara berkala, pembentukan forum dialog antara pemerintah, pengelola PLTSa, dan masyarakat sekitar, serta penyediaan akses informasi yang terbuka

mengenai kondisi operasional dan pemantauan lingkungan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan lingkungan juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan secara langsung kepada pihak yang berwenang. Dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah berbasis *Waste to Energy* dapat semakin meningkat sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.